

**TATA KELOLA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA**  
**Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Sukamelang**  
**Kabupaten Indramayu**

SKRIPSI  
Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh

**Mochamad Alif Al Fajar**

1606016024

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKPROGRAM**  
**STUDI ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**WALISONGO SEMARANG**

**2023**

PENGESAHAN

SKRIPSI

TATA KELOLA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA SUKAMELANG KABUPATEN  
INDRAMAYU)

Disusun oleh: Mochamad Alif Al Fajar

1606016024

Telah dipertahankan di majlis penguji skripsi

Pada tanggal 27 juni 2023 dan dinyatakan LULUS.

Susunan Dewan Penguji



Penguji I  
Fanani, M.Ag.  
NIP. 197809302003121001

Penguji II

Muhammad Mahsun M. A.  
NIP.198511182016011901

Pembimbing

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.  
NIP. 198505022019031007

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Mochamad Alif Al Fajar menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Good Governance Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Sukamelang Kabupaten Indramayu” merupakan hasil kerja keras saya sendiri serta di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2023



Mochamad Alif Al Fajar  
1606016024

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Ibu Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN  
Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah dibaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana  
Semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Mochamad Alif Al Fajar

NIM : 1606016024

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Good Governance Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus  
Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Sukamelang Kabupaten Indramayu)

Dengan ini sudah saya setuju sehingga mohon untuk segera diujikan. Demikian,  
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 20 Juni 2023

Pembimbing



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP. 198505022019031007

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Good Governance Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Sukamelang Kabupaten Indramayu”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang lebih terang. Skripsi ini disusun dan diselesaikan oleh penulis guna memenuhi syarat memperoleh gelar Program Strata Satu (S.Sos) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

Mengenai penulisan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu selama proses penelitian ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kesehatan untuk penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Drs.H.Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Muhammad Mahsun, M.A
6. Dosen pembimbing skripsi, Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si. atas segala ilmu yang diberikan dalam arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

9. Ayah dan Ibu Penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi selama penyusunan skripsi
10. Saudara Penulis yang selalu memberikan bantuan berupa doa dan motivasi
11. Sahabat sahabat Penulis yang selalu memberikan bantuan dalam penulisan skripsi
12. Kepada Yuki Hayashi, yang telah membantu memberikan dorongan emosional melalui musiknya sehingga penulis mampu bekerja dengan semangat yang membara dan jiwa yang terinspirasi.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat untuk penulis khususnya ataupun untuk orang lain. Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 20 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is stylized and appears to read 'Mochamad Alif Al Fajar'.

Mochamad Alif Al Fajar

1606016024

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Almamater Penulis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

## **MOTTO**

***“Kedewasaan seseorang : setelah menemukan kembali keseriusan yang pernah dimilikinya saat masih anak-anak, saat sedang bermain”***

***- Mochamad Alif Al Fajar***



## **ABSTRAK**

Good Governance dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Sukamelang, Kabupaten Indramayu) Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsibilitas, dan aturan hukum yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Governance dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukamelang, Kabupaten Indramayu.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Responden penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Sukamelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam implementasi Good Governance dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukamelang. Kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran dan informasi yang tersedia menjadi kendala utama. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan masih terbatas, dan mekanisme pengawasan yang kuat juga belum terbangun. Rekomendasi penelitian ini meliputi perluasan akses informasi kepada masyarakat terkait alokasi anggaran dan rencana pembangunan jalan, peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa dan forum publik, serta penguatan mekanisme pengawasan melalui pembentukan tim pengawas independen dan peran aktif BPD dalam melakukan pengawasan. Diharapkan dengan implementasi Good Governance yang lebih baik, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukamelang dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memahami pentingnya penerapan prinsip Good Governance dalam pembangunan desa, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukamelang, Kabupaten Indramayu.

*Kata Kunci: Good Governance, Pembangunan Desa, Infrastruktur Jalan, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas.*

## **ABSTRACT**

*Good Governance in Village Development (Case Study of Road Infrastructure Development in Sukamelang Village, Indramayu District) Effective and sustainable village development requires the application of the principles of good governance which include transparency, participation, accountability, responsibility, and good rule of law. This study aims to analyze the implementation of Good Governance in the construction of road infrastructure in Sukamelang Village, Indramayu Regency.*

*The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and analysis of related documents. Research respondents included the Village Head, Village Secretary, members of the Village Consultative Council (BPD), and the people of Sukamelang Village.*

*The results of the study indicate that there are weaknesses in the implementation of good governance in the development of road infrastructure in Sukamelang Village. The lack of transparency in budget allocations and available information is the main obstacle. In addition, community participation in decision-making related to road construction is still limited, and strong oversight mechanisms have not yet been developed. Recommendations for this research include expanding access to information for the public regarding budget allocations and road development plans, increasing community participation through village deliberations and public forums, and strengthening oversight mechanisms through the establishment of an independent monitoring team and the active role of the BPD in conducting oversight. It is hoped that with better implementation of Good Governance, road infrastructure development in Sukamelang Village can become more transparent, accountable and sustainable. This research contributes to stakeholders, village government and the community in understanding the importance of applying the principles of good governance in village development, especially in the context of road infrastructure development in Sukamelang Village, Indramayu Regency.*

*Keywords: Good Governance, Village Development, Road Infrastructure, Transparency, Participation, Accountability*

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metodologi penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	9
2. Sumber dan jenis data .....	9
3. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II .....	13
KERANGKA TEORI .....	13
A. Denifisi Konseptual.....	13
B. Teori Good Governance .....	14

BAB III .....	22
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	22
A. Peta Administratif Kabupaten Indramayu.....	22
B. Kondisi Geografis Kabupaten Indramayu.....	23
C. Topologi Wilayah Kabupaten Indramayu.....	23
D. Hidrologi Kabupaten Indramayu.....	24
E. Kondisi Sosial Ekonomi.....	26
F. APBDES.....	28
G. PERDES .....	29
H. RPJMDES.....	31
BAB IV .....	34
GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN JALAN .....	34
A. Penerapan Teori Good Governance dalam Pembangunan Jalan .....	34
B. Implikasi Berdasarkan Landasan Teori Good Governance . .....	50
C. Analisis.....	58
BAB V .....	59
KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	65

## **BAB I**

### **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014. Yaitu tentang Desa. Tinjauan undang-undang menunjukkan bahwa desa-desa mulai memiliki kebebasan dan keistimewaan konvensional dalam mengatur dan menangani kepentingan-kepentingan daerah setempat dan berperan dalam memahami tujuan otonomi dalam terang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa berkembang dengan berbagai cara selama periode ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa-desa tersebut perlu dilindungi dan diberi kekuatan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan pemerintahan guna membangun masyarakat yang sejahtera. Jika kita memahami struktur hukum pemerintahan desa, struktur sebelumnya masih digunakan. Hal ini terlihat dari teks hukum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintahan yang baik atau *good governance* kini menjadi hal terpenting yang diidamkan setiap warga negara. Namun demikian, penyelenggaraan kehidupan bernegara saat ini khususnya berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan terutama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemerintahan yang baik secara menyeluruh. Dalam hal ini, pembangunan desa hanya akan berhasil jika dilakukan dengan model, sistem, dan mekanisme yang tepat. Sistem Peningkatan Kota adalah program koordinasi antara dua pertemuan mendasar, khususnya: berbagai inisiatif pemerintah dan keterlibatan dalam masyarakat

Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan yang menekankan pada kearifan lokal di pedesaan, seperti struktur demografi masyarakat, ciri sosial budaya, ciri

alam dan geografis, pola kegiatan agribisnis, model keterkaitan ekonomi antara desa dan kota, dan bidang kelembagaan. dan ciri-ciri kawasan atau lingkungan pemukiman Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan landasan ekonomi negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah. Ini adalah solusi untuk perubahan sosial, dan desa berfungsi sebagai fondasi perubahan. (Suyitno, 2004).

Keseriusan Indonesia terhutang oleh persoalan kerangka kerja. Jelas, ketika kita berbicara tentang yayasan, kita perlu melihatnya tentang kecukupan/jumlah, kualitas dan skala/penyertaan dari kerangka yang sebenarnya. terdiri dari sisi cakupan distribusi infrastruktur di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salah satu fondasi fundamental yang signifikan adalah jalan. Jalan umum dibagi menjadi jalan utama, jalan kabupaten, jalan administrasi/kota, dan jalan desa sesuai dengan kondisinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Operasi infrastruktur terhambat oleh kerusakan jalan ini. Rusaknya jalan ini jelas membuat pembangunan menjadi lebih sulit, meredam rencana keseluruhan untuk meningkatkan perekonomian negara.

Membangun atau mewujudkan mekanisme pemerintahan yang mampu mewujudkan misinya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu persoalan mendasar dengan pemerintahan desa. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik bagi publik, Sebagaimana diungkapkan dalam (Solekhan, 2012), gagasan pemerintah dan organisasi adalah untuk menawarkan dukungan yang paling ideal kepada masyarakat.

Birokrasi yang buruk tentu saja mempengaruhi pelayanan, yang berujung pada ekonomi biaya yang tinggi dan rusaknya moral dan mentalitas aparat itu sendiri. Birokrasi Indonesia menjadi semakin runyam akibat penggunaan prinsip-prinsip birokrasi yang disalah tafsirkan dan diselewengkan. Uraian akibat buruknya birokrasi yang berlaku saat ini memiliki beberapa akibat, yaitu:

1. Hirarki yang kaku berarti bahwa birokrasi eksekutif kehilangan inisiatif dan lambat bereaksi, bahkan dalam situasi mendesak, kecuali diarahkan oleh atasannya.
2. Aturan yang tumpang tindih dan terlalu mencurigai berdampak pada mematikan inisiatif masyarakat.

3. Kualitas pelayanan masyarakat yang belum efisien dan efektif karena dampak dari ketidakjelasan standar tentang berapa lama waktu serta kurangnya transparansi mengenai berapa biaya pelayanan yang sebenarnya.
4. Karena warisan politik masa lalu dan hubungan hierarkis yang kaku, birokrasi terlalu gemuk dan tidak mampu mengenali urgensi setiap urusan.

Desa Sukamelang adalah sebuah desa kecil di bagian barat Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pendidikan yang rendah dan banyaknya kelompok usia produktif, namun kekurangan tenaga kerja terampil, menjadikan desa Sukamelang sebagai salah satu desa berkembang. Kegiatan pemuda dan PKK juga tidak terlaksana karena masyarakat masih pasif dan tidak berpartisipasi dalam pembangunan desa, ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses informasi adalah salah satu penyebab masyarakat terlihat pasif. Namun jika berbicara tentang infrastruktur berupa jalan yang benar-benar terlihat dan benar-benar menjadi andalan segala aktivitas desa, masyarakat Sukamelang tentu sadar akan infrastruktur desa yang sedang memprihatinkan. Menurut banyak pihak, kegiatan pengurus desa dalam pembangunan infrastruktur belum maksimal, padahal pengurus baru berdiri sekitar tiga tahun. Jalan di desa ini memang cukup seram saat musim hujan tiba, beberapa jalan tergenang air, banyak jalan yang berlubang besar dan licin sedangkan jalan ini merupakan jalan utama yang digunakan masyarakat untuk keluar masuk desa. Pemerintah sepertinya tidak memperhatikan hal ini, sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi.

Berikut adalah beberapa fakta sosial yang dapat diambil dari analisis mengenai pelanggaran prinsip good governance dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang:

1. Ketidakperbaikan jalan sejak 2018 telah menyebabkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi masyarakat setempat.
2. Kurangnya upaya proaktif dari pemerintah desa dalam mengalokasikan dana dan sumber daya yang diperlukan menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan.
3. Kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran pembangunan jalan menghambat kemampuan masyarakat untuk memahami penggunaan dana publik secara adil dan efisien.
4. Ketidakjelasan dan kebingungan dalam proses pembangunan jalan akibat minimnya

informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

5. Minimnya akses masyarakat untuk memantau dan mengawasi proyek pembangunan jalan mengurangi efektivitas pengawasan dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau praktik korupsi.
6. Kurangnya pertanggungjawaban terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalan membuat masyarakat sulit memverifikasi penggunaan dana publik dan kualitas pekerjaan yang dilakukan.
7. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif dari pemerintah desa mengakibatkan kurangnya penjagaan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dengan baik.
8. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya forum partisipasi mengabaikan prinsip good governance yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.
9. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi proyek pembangunan jalan dan kurangnya keterlibatan dalam pemantauan atau pengawasan mengurangi akuntabilitas dan efektivitas pembangunan jalan.
10. Tidak adanya strategi perencanaan jangka panjang dan kurangnya pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan rutin mengakibatkan jalan menjadi rusak dan tidak berkelanjutan dalam jangka waktu yang singkat.

Fakta-fakta sosial ini menggambarkan dampak dan konsekuensi pelanggaran prinsip good governance dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Hal ini menyoroti perlunya tindakan perbaikan yang melibatkan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan selama ini, sehingga jalan tersebut tidak pernah mengalami perbaikan, dalam proses pembangunan desa berupa infrastruktur pemerintah desa tidak memiliki media yang jelas dikarenakan website desa telah vakum lebih dari 7 tahun, sehingga masyarakat juga memiliki sedikit akses terhadap informasi yang seharusnya tersedia, aksesibilitas, seperti transparansi dana pembangunan desa, serta



ajakan dari pemerintah desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Good Governance dalam pembangunan desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Sukamelang Kabupaten Indramayu)**”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang, penelitian yang berfokus pada “Good governance dalam Pembangunan desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Sukamelang Kabupaten Indramayu)”. maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui.

1. Bagaimana partisipasi, Akuntabilitas dan Transparansi dalam pembangunan infrastruktur Desa Sukamelang .

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan infrastruktur desa Sukamelang.

#### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

##### **A. Manfaat secara praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Selain memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintahan desa diimplementasikan dalam pembangunan desa, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pengetahuan dan pemahaman yang ada. yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan serupa. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi dari peraturan maupun perundangan berdasarkan kesesuaian kebijakan lanjutan.

##### **b. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Eksplorasi ini diharapkan menjadi bahan referensi nantinya dalam kajian tambahan tentang administrasi besar dalam kaitannya dengan pembangunan desa.

##### **c. Penelitian Bagi Pemerintah Desa**

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pertimbangan tata pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan desa.

##### **d. Penelitian Bagi Masyarakat**

Idealnya, kajian ini akan menjadi kajian pengetahuan masyarakat desa tentang tata pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur jalan

#### B. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan dapat juga bermanfaat bagi kalangan pendidikan, khususnya FISIP UIN Walisongo Semarang, pemerintah, dan masyarakat pemerintah desa.

#### C. Manfaat secara akademis

Nilai temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian politik. Selain itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh para sarjana lain dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

Selama penelitian, penulis memanfaatkan serta menggunakan referensi yang diterbitkan oleh para peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur, hal tersebut dapat memberikan peneliti wawasan tambahan ketika memahami serta mempelajari situasi sosial terkait masalah. Untuk mendukung hasil penelitian yang dicapai, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Skripsi dengan judul “Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto” Oleh Sudarni. Mekanisme pengelolaan anggaran infrastruktur desa Bululoe berawal dari APBD kemudian bergerak ke perencanaan anggaran kegiatan oleh SKPD, selanjutnya dikirim ke SKPD untuk diproses lebih lanjut di Musrembang setelah diajukan ke kecamatan atau desa (pemda), untuk selanjutnya didistribusikan ke semua orang. desa. Namun dalam prosesnya, karena kepentingan elite politik dalam proses pengalokasian anggaran, belum lagi banyaknya biaya yang membebani kota mengakibatkan pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur Desa Bululoe tidak berjalan sebagaimana mestinya. masih belum puas, karena beberapa program pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur, selama ini belum dilaksanakan. Mereka menganggap bahwa anggaran yang direncanakan telah dialokasikan untuk pembangunan desa dan hasilnya tidak dapat dinikmati. Pemerintah khususnya terkesan mengabaikan akses jalan layak yang sangat mereka butuhkan selama 9 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur juga masih kurang baik, meski anggaran desa harus dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, meski tidak ada transparansi dari pihak masyarakat.

Jurnal dengan judul “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. Oleh Neneng. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat, dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, di sisi lain menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Ada lima cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan, yaitu: mempercepat terbentuknya UU pelayanan publik, pembentukan pelayanan publik satu atap (one stop service), transparansi biaya pengurusan pelayanan publik, membuat SOP, dan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik. b. Rekomendasi Birokrasi di Indonesia belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, adil, responsif, dan akuntabel.

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memberdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan” Oleh Djen Ahmad Idrus. Melalui sosialisasi tentang infrastruktur desa, penelitian ini menjelaskan kontribusi pemerintah desa Kanjilo dalam pembangunan sektor infrastruktur desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunannya. Di dalam sistem kajian ini, akan diupayakan untuk menggambarkan tugas kepala desa dalam pembangunan yayasan kota. Di bidang infrastruktur desa terdapat hambatan dalam pemberdayaan masyarakat desa :

- Sarana dan prasarana yang minim menghambat efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.
- Dewan desa terus mengeluh tentang kurangnya transportasi.
- Dana yang dialokasikan ke desa tidak dicairkan, dan pemerintah kota tidak mengeluarkan kebijakan untuk mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri dan komersial.

Jurnal dengan judul “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”. Oleh Andi Asnudin. Kajian ini mendeskripsikan tentang bagaimana masyarakat

ikut terlibat dalam proses PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) 2009 dan dampaknya. Dengan metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yang melibatkan seluruh populasi di beberapa dari 25 desa binaan PPIP di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan meskipun masyarakat puas dengan efisiensi kinerja secara teknis dan proyek pembangunan pedesaan yang memang layak, namun keberlanjutannya masih lemah. Sehingga, perlu perhatian lebih terhadap proyek di masa depan, seperti : peningkatan aspek organisasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Proyek pembangunan infrastruktur pedesaan mempromosikan masyarakat dan pembangunan pedesaan lebih efektif bila diikuti oleh program untuk memperkuat lembaga masyarakat dan menumbuhkan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Termasuk pertimbangan program infrastruktur lingkungan kota (perlindungan sumber air, pengelolaan limbah, dll.).

Skripsi dengan judul “Peranan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Citta, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng”. Oleh Luqman. Dalam hasil penelitian dijelaskan mengenai pentingnya peran Kades (kepala desa) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepala desa memiliki peran sebagai motivator, dinamisator dan katalisator dalam masyarakat yang terimplementasi dalam bentuk pemberian penyuluhan, perintah, dan bantuan baik itu barang maupun fasilitas. Upaya tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran dan partisipasi mereka terhadap pembangunan. Faktor kepemimpinan kades, tingkat pendidikan (pengetahuan) dan pendapatan (pekerjaan) masyarakat, dan kesadaran masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan pembangunan masyarakat

Jurnal dengan judul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Wilayah di Indonesia”. Oleh Fika Novitasari, Sri Maryati. Pembangunan ekonomi berdampak pada tingkat kesejahteraan manusia tidak hanya tercermin melalui pertumbuhan perkapita, tetapi juga melihat indikator lain seperti perbaikan sosial, ekonomi, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dll. Pembangunan wilayah negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan permasalahan yaitu disparitas atau ketimpangan wilayah. Hal ini tergambar dari disparitas produksi di sebagian wilayah Indonesia yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) daerah. Ketersediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi juga menjadi tantangan bagi negara sebesar Indonesia. Di Indonesia, penelitian tentang hubungan antara dampak infrastruktur terhadap pembangunan daerah masih sedikit, khususnya dalam kaitannya dengan

ketimpangan wilayah. Faktor infrastruktur yang secara signifikan mempengaruhi karakteristik pembangunan wilayah Indonesia dapat diidentifikasi. Misalnya, di daerah-daerah di mana produk domestik bruto (PDB) regional per pertumbuhan penduduknya rendah, perpanjangan jalan raya dapat dilakukan

## **E. Metodologi penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian lapangan, dimana penulis terjun secara langsung ke lokasi di Sukamelang Kab Indramayu untuk memperoleh data dari pemerintahan desa.

Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dan berbasis naratif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan motivasi, serta tindakan yang menggunakan bahasa dan kata-kata. (Moleong, 2001). Pendekatan naratif adalah suatu kemampuan untuk digunakan dalam memahami suatu identitas, pandangan dunia seseorang yang mengacu pada cerita narasi yang didengarkan penulis atau tuturan di dalam aktivitas sehari-hari. Peneliti melakukan pendekatan ini bersama Pemerintahan desa dan masyarakat setempat.

### **2. Sumber dan jenis data**

Sumber data adalah memberikan informasi mengenai data yang dihasilkan peneliti. Berdasarkan dengan sumber yang ada, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data yang dikumpulkan secara langsung dari para peneliti, untuk subjek dalam penulisan disebut sebagai data primer (Husein, 2003). Data primer penelitian ini berasal dari pemerintah desa, masyarakat sekitarnya

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah suatu data sebagai pendukung yang dihasilkan peneliti dari berbagai macam tulisan seperti literatur, artikel, jurnal, dan suatu data dari peneliti yang diperoleh berdasarkan situs-situs terpercaya yang ada pada Internet (Sugiyono, 2006). Peneliti memerlukan data-data yang bersumber dari jurnal dan buku-buku

tentang masalah yang menjadi fokus penelitian ini, serta catatan lingkungan tentang tema masalah berkaitan tentang good governance dalam pembangunan desa

### 3. Teknik pengumpulan data

Guna mengumpulkan data yang diperlukan di riset ini, penulis melakukan hal berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati secara langsung dan menspesifikasikan suatu objek yang akan diteliti. Pengamatan langsung juga dapat memberikan informasi dari orang-orang yang tidak dapat atau tidak mau berkomunikasi secara verbal. Pengamatan saya lakukan di Desa Sukamelang, Indramayu.

#### b. Wawancara

Wawancara prosedur yang mana penanya (penulis) serta responden atau orang yang diwawancarai menggunakan panduan wawancara guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui secara tatap muka (Nazir, 1985). Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara terbuka. Melalui wawancara semi terstruktur, pertanyaan baru dapat muncul dan data yang diperoleh dapat berkembang dari jawaban informan. (Alijoyo, 2021).

Target wawancara saya yaitu Kepala Desa Sukamelang, Sekretaris Desa Sukamelang serta masyarakat Desa Sukamelang

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dokumen biasanya berupa tulisan, gambar foto, atau karya monumental (Sugiyono, 2005). Penggunaan teknik dokumenter memungkinkan peneliti memperoleh bukti dari wawancara dengan informan, serta bukti dari kegiatan observasi di lokasi penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah bersifat empiris dimana suatu analisis ini didasarkan pada perolehan data yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, pencarian dataterus dilakukansampai hipotesis ini menemui jawaban diterima atau ditolak, apabila diterima akan

berkembang menjadi sebuah teori (Sugiyono, 2017).

Bogdan (Sugiyono, 2017), Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis berdasarkan hasil survei, temuan lapangan, dan sumber lain sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017), analisis data dilakukan secara interaktif, berlanjut hingga detik terakhir, dan hasilnya sudah lengkap. Analisis data sedang berlangsung selama proses pengumpulan data, dan segera setelah data terlihat tidak konsisten, maka akan dilanjutkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017, hal.247), reduksi data digambarkan sebagai proses pengumpulan informasi tentang data sebelum diedit. Hal ini menghasilkan produksi grafik yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan pola dan temanya.

#### 2) Penyajian Data

Setelah data diolah, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Untuk tujuan tampilan kuantitatif, ini dapat dilakukan dalam bentuk grafik batang satu warna, bagan, hubungan kategori-ke-kategori, bagan alur, atau yang lainnya sama sekali. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017, hlm. 249) penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

#### 3) Verifikasi

Huberman, Miles dan (Sugiyono, 2017, hal.252), Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah selanjutnya dalam analisis data kuantitatif. Kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang saat ini belum ada, temuan-temuan yang semula masih samar kejelasannya menjadi jelas dan dapat berupa interaktif atau teori. Agar sebuah kesimpulan dianggap kredibel, harus ada dokumentasi pendukung yang sah.

### **B. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini guna mempermudah pemahaman dalam memberikan gambaran secara menyeluruh, skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan susunan yang sistematis.

Bab I berisi tentang penjelasan latar belakang, Rumusan masalah, Dilanjutkan dengan penulisan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari skripsi ini beserta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti serta menyertakan kajian pustaka dari berbagai macam penelitian terdahulu serta alasannya yang mendasari lahirnya penelitian ini.

Bab II berisi tentang pemaparan kerangka teoritis sebagai landasan penulisan skripsi dengan berdasarkan teori good governance.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang merupakan Landscape Kabupaten Indramayu. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang letak geografi, topografis, hidrografis, kondisi sosial ekonomi.

Bab IV Pada bagian ini menjelaskan bagaimana penerapan aspek dalam teori good governance yaitu partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan infrastruktur desa sukamelang.

Bab V Berisi tentang penutup berupa kesimpulan hasil dari penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya dengan disertai saran penelitian.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah batasan konsep yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah :

##### **a. Good Governance**

Istilah Good Governance merupakan wacana yang muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah Good Governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian Good Governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (masyarakat dan dunia usaha/pasar). Arti Good Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance), menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, untuk wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”. Sehingga Good Governance,

dengan demikian adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

b. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan untuk membuat suatu pertumbuhan dan perubahan, sebagai bagian dari pembangunan bangsa, bangsa pemerintah dan negara harus melakukannya secara sadar dan terencana. singkatnya berarti baik negara maupun provinsi harus memperhatikan pembangunan pedesaan guna mencapai tujuan pembangunan nasional. ( S.P. Siagian 2005).

c. Pembangunan desa

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dilakukan upaya pembangunan desa. Sehubungan dengan itu, kepala desa harus membuat rencana pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta menggunakan segala potensi dan sumber daya dengan berpedoman pada rencana pembangunan kota/kabupaten.

## 2. Teori Good Governance

Pada penelitian didukung dengan teori politik yang relevan dengan menggunakan teori Good governance, atau tata pemerintahan yang baik, adalah sebuah konsep yang menekankan prinsip-prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Teori good governance berlaku dalam konteks fakta sosial di Indonesia, di mana penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pemerintahan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2009:276) : “Good government governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.”

### 1. Pilar- Pilar Good Governance

Institusi dari Good Governance meliputi tiga pilar yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat, yang saling berinteraksi dan menjalan-

kan fungsinya masing-masing. Negara atau pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif serta berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan pembangunan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional maupun internasional dan global. Sektor Swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Negara

- Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- Menyediakan pelayanan publik yang efektif
- Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Melindungi lingkungan hidup
- Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public

b. Sektor Swasta

- Menjalankan industry
- Menciptakan lapangan kerja
- Menyediakan insentif bagi karyawan
- Meningkatkan standar hidup masyarakat
- Memelihara lingkungan hidup
- Menaati peraturan
- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- Menyediakan kredit bagi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

d. Masyarakat Madani

- Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- Memengaruhi kebijakan public
- Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Dalam konteks fakta sosial di Indonesia, good governance melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

**Transparansi:** Transparansi dalam good governance mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi publik dan diakses kepada masyarakat, termasuk data keuangan, kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan tindakan pemerintah secara umum. Hal ini juga melibatkan pemenuhan hak masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan mengawasi kegiatan pemerintah.

#### **Manfaat Transparansi dalam Good Governance**

1. **Meningkatkan akuntabilitas:** Transparansi membantu meningkatkan akuntabilitas institusi pemerintah dengan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Informasi yang terbuka memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.
2. **Mendorong partisipasi publik:** Dengan menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses, transparansi mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang lebih inklusif.
3. **Mencegah korupsi:** Transparansi dapat berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi dengan mengungkapkan pelanggaran dan ketidakpatuhan. Ketika tindakan pemerintah terekspos dan dapat diperiksa oleh masyarakat, risiko korupsi dapat dikurangi.
4. **Meningkatkan efisiensi:** Dengan transparansi, informasi yang diperlukan dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini membantu mengurangi birokrasi yang berlebihan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mengurangi risiko penyelewengan.

## **Langkah-langkah untuk Memastikan Transparansi yang Efektif**

1. **Peningkatan akses terhadap informasi:** Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses melalui situs web, publikasi, dan sarana komunikasi lainnya. Informasi yang harus diungkapkan mencakup anggaran publik, kontrak pemerintah, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan.
2. **Peningkatan partisipasi publik:** Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti konsultasi publik, forum partisipatif, dan dialog terbuka. Pemerintah harus menerima masukan dan tanggapan masyarakat dengan sungguh-sungguh.
3. **Peningkatan akuntabilitas:** Pemerintah harus melakukan audit dan pemantauan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi. Institusi pemerintah juga harus menerapkan mekanisme pelaporan yang efektif dan menyelidiki dugaan pelanggaran dengan tindakan tegas.
4. **Peningkatan kerja sama:** Transparansi yang efektif membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan transparansi yang lebih besar.
5. **Penggunaan teknologi informasi:** Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan platform digital untuk mengakses dan membagikan informasi. Aplikasi dan sistem terkait harus diperbarui secara teratur untuk memastikan kean yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang adil. Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudalan dan keamanan informasi.

Akuntabilitas: Akuntabilitas dalam good governance mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan mereka kepada publik yang mereka layani. Hal ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, partisipasi publik, pemantauan, serta sanksi atau hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran.

### **Manfaat Akuntabilitas dalam Good Governance**

1. **Peningkatan kepercayaan masyarakat:** Akuntabilitas yang kuat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, masyarakat merasa yakin bahwa kepentingan mereka diutamakan, dan hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas:** Akuntabilitas yang baik memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya pemantauan, tindakan yang tidak efisien atau tidak efektif dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga meningkatkan penggunaan sumber daya publik yang lebih baik.
3. **Mencegah penyalahgunaan kekuasaan:** Akuntabilitas yang kuat melibatkan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyelewengan sumber daya publik. Pemerintah dan pejabat publik yang tidak akuntabel dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai.
4. **Mendorong partisipasi publik:** Akuntabilitas memungkinkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan transparansi dan akses terhadap informasi yang memadai, masyarakat dapat memberikan masukan, mengevaluasi kebijakan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

#### **Strategi untuk Membangun Akuntabilitas yang Efektif**

1. **Transparansi dan keterbukaan informasi:** Pemerintah harus menyediakan akses terbuka dan mudah diakses kepada informasi yang relevan bagi masyarakat. Informasi tersebut mencakup kebijakan publik, keputusan penting, anggaran, dan laporan kinerja. Pemerintah juga harus memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh publik.
2. **Partisipasi publik:** Pemerintah harus mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi, dialog, dan mekanisme partisipatif lainnya. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, mengemukakan kekhawatiran, dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diusulkan.

3. **Pemantauan independen:** Keberadaan lembaga pemantauan independen seperti auditor eksternal, ombudsman, dan media yang bebas merupakan elemen penting dalam membangun akuntabilitas yang efektif. Lembaga-lembaga ini dapat mengawasi kegiatan pemerintah, melaporkan pelanggaran, dan mendorong tindakan perbaikan.
4. **Hukuman dan sanksi:** Penting bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi atau hukuman yang sesuai terhadap pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas. Ini mencakup tindakan disiplin internal, pengusutan hukum terhadap pelanggaran korupsi, dan tanggung jawab hukum terhadap pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Partisipasi: Partisipasi dalam good governance mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini melibatkan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, berpartisipasi dalam forum diskusi, dan mengawasi kinerja pemerintah. Partisipasi publik memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat diwakili secara adil dan diintegrasikan dalam kebijakan dan program yang dirancang.

#### **Manfaat Partisipasi dalam Good Governance**

1. **Legitimasi dan kepercayaan:** Partisipasi publik memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka merasa dihargai dan dianggap penting. Hal ini membantu membangun hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan dan program yang diimplementasikan.
2. **Meningkatkan kualitas kebijakan:** Partisipasi publik memungkinkan berbagai sudut pandang dan pengetahuan dari masyarakat yang beragam untuk diperhitungkan dalam perumusan kebijakan. Melalui partisipasi, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan merancang solusi yang lebih tepat dan efektif.
3. **Pengawasan dan akuntabilitas:** Partisipasi publik berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah. Dengan keterlibatan masyarakat dalam peman-

tauan, pelaporan, dan evaluasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyelewengan sumber daya dapat diidentifikasi dan dikoreksi dengan lebih efektif. Partisipasi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap warga negara.

4. **Pembangunan yang berkelanjutan:** Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan warga negara, kebijakan dan program pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga mencapai dampak yang lebih positif dan berkelanjutan.

#### **Strategi untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Efektif**

1. **Transparansi dan akses informasi:** Pemerintah harus menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi yang relevan bagi masyarakat. Informasi tersebut mencakup rencana kebijakan, anggaran, keputusan penting, dan laporan kinerja. Pemerintah juga harus memastikan informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan saluran komunikasi yang mudah diakses.
2. **Mengatasi hambatan partisipasi:** Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi publik, seperti akses terbatas ke informasi, keterbatasan sumber daya, atau ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginalisasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
3. **Meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat:** Pemerintah harus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi publik. Melalui pelatihan, pendidikan, dan kampanye informasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.
4. **Mengintegrasikan partisipasi dalam kebijakan dan proses:** Partisipasi publik harus diintegrasikan secara sistematis dalam perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Ini melibatkan pembentukan mekanisme partisipatif yang inklusif, seperti forum diskusi publik, konsultasi, kelompok kerja, atau mekanisme pengawasan independen



Penerapan konsep good governance dalam fakta sosial di Indonesia adalah suatu tantangan yang kompleks, namun dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan transparan kepada kepentingan masyarakat

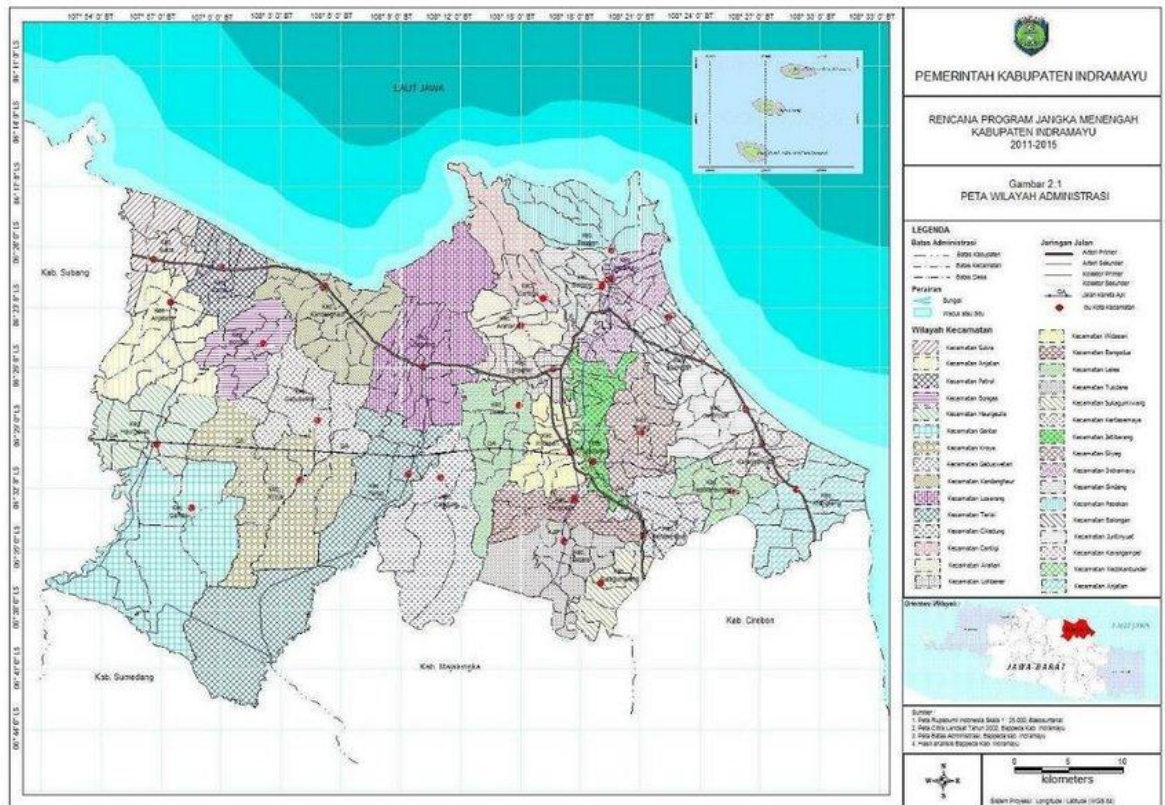
### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pembahasan pada Bab III akan menjelaskan tentang Gambaran Objek Penelitian yang dijelaskan oleh penulis untuk memberikan gambaran dari objek atau daerah yang akan diteliti. Gambaran objek penelitian ini akan berisi informasi mengenai Gambaran umum dari Kabupaten Indramayu yang meliputi Peta dari Kabupaten Indramayu, kondisi geografis, topografi, dan hidrologi. Selain itu, bab III ini juga akan fokus pada bagaimana kondisi sosial-politik serta kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian uraian penjelasan di bab III akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Indramayu

##### 1. Peta Administrasi Kabupaten Indramayu



Gambar 1 Peta wilayah administrasi kabupaten Indramayu Sumber : RPJMD Kabupaten Indramayu 2011-2015. 3

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Indramayu

Secara geografis Kabupaten Indramayu terletak antara 107° 52' - 108° 36' Bujur Timur dan 6° 0' 15" dan 6° 0' 40" Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 - 2%. Kabupaten Indramayu mempunyai luas wilayah 204.011 Ha, dengan memiliki 31 Wilayah Kecamatan, 315 Desa dan 8 Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 berjumlah 1.744.897 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2009 mencapai 0,70%. Kabupaten Indramayu termasuk dalam Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka,  
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Cirebon.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Subang.

Secara administratif Kabupaten Indramayu mempunyai luas wilayah 204.011 Ha, dengan memiliki 31 Wilayah Kecamatan, 315 Desa dan 8 Kelurahan. Kecamatan-Kecamatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## 3. Topografi Wilayah Kabupaten Indramayu

Topografi Kabupaten Indramayu sebagian besar wilayah (98,70 %) berada pada ketinggian 0 - 100 m diatas permukaan air laut. Bagian utara berketetapan rendah dan semakin tinggi kearah selatan. Dilihat dari topografinya, sebagian besar merupakan dataran landai dengan kemiringan lahan rata-rata 0 - 2 %. Bila curah hujan tinggi, genangan air akan muncul di daerah-daerah tertentu. Secara garis besar topografi Kabupaten Indramayu dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Ketinggian antara 0 - 7 m dpl, meliputi : Wilayah Kecamatan Anjatan, Kandanghaur, Losarang, Sindang, Lohbener, Indramayu, Sliyeg, Juntinyuat, Karangampel, dan wilayah Kecamatan Krangkeng.

2. Ketinggian antara 7 - 25 m dpl, meliputi : Wilayah Kecamatan Bon-  
gas, Gabuswetan, sebagian wilayah Kecamatan Anjatan, Lelea,  
Widasari, Jatibarang, Kertasemaya, Cikedung dan Kecamatan Ban-  
godua.
  3. Ketinggian antara 25 - 100 m dpl, meliputi : Sebagian wilayah  
Kecamatan Cikedung dan sebagian wilayah Kecamatan Haurgeulis.
4. Hidrologi Kabupaten Indramayu

Pembahasan bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang aspek fisik dasar khususnya mengenai sumber air bersih yang akan digunakan di dalam proses pengolahan pada industri perikanan.

Sumber daya air yang ada di Kabupaten Indramayu meliputi air per-  
mukaan dan air tanah. Air permukaan berupa air sungai dan air genangan,  
sedangkan air tanah terdiri dari air tanah bebas dan air tanah tertekan.

1) Air Permukaan

Dengan kondisi geografis dan fisiografis wilayah yang meru-  
pakan dataran rendah dan pantai serta pada bagian hilir daerah aliran  
sungai yang besar, yaitu DAS Cimanuk dan Cipunagara, Kabupaten  
Indramayu menjadi salah satu wilayah di Jawa barat sebagai daerah  
sentra pertanian dan merupakan daerah penyangga pengadaan stok  
pangan Provinsi dan Nasional. <sup>TM</sup>

- Daerah Aliran Sungai (DAS)

Di wilayah Kabupaten Indramayu terdapat 14 aliran  
sungai yang mengalir kearah utara yaitu ke Laut Jawa dan  
sungai yang tergolong besar adalah Sungai Cimanuk, Cila-  
lanang, Cipanas, Pangkalan dan Sungai Eretan. Pola aliran  
sungai di Kabupaten Indramayu pada umumnya meranting  
dan anastomatik, yaitu dengan terdapatnya “meander cut”.

- Satuan Wilayah Sungai (SWS)

1. SWS Citarum

SWS Citarum di wilayah pantai Jawa Barat bagian  
utara merupakan bagian dari SWS Citarum hilir yang  
mempunyai luas 6.154 km<sup>2</sup> (sekitar 30 % dari luas SWS

Citarum). SWS Kabupaten Indramayu mempunyai luas 648 km<sup>2</sup>. *f* Curah hujan tahunan di SWS Citarum rata-rata sebesar 2.358 mm, sedangkan aliran rata-rata di bagian hilir mencapai 13.0 milyar m<sup>3</sup>/tahun. Dengan debit aliran sebesar ini SWS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, industri dan sebagainya.

## 2. SWS Cimanuk

SWS Cimanuk termasuk wilayah dalam Provinsi Jawa barat dan mempunyai luas 4.325 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Indramayu termasuk kedalam SWS Cimanuk dengan luas 1.238 km<sup>2</sup>. *f* Curah hujan tahunan yang terjadi di SWS Cimanuk rata-rata sebesar 2.070 mm. potensi aliran rata-rata mencapai kapasitas sebesar 4.0 milyar m<sup>3</sup> /tahun

## 3. SWS Cisanggarung

SWS Cisanggarung termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan mempunyai luas 2.560 km<sup>2</sup>. Kabupaten yang termasuk dalam SWS Cisanggarung di wilayah pantai Jawa Barat utara, salah satunya adalah Kabupaten Indramayu dengan luas 221 km<sup>2</sup>. *f* Curah hujan tahunan di SWS Cisanggarung rata-rata sebesar 2.032 mm, sedangkan potensi aliran rata-rata mencapai kapasitas sebesar 2.0 milyar m<sup>3</sup> /tahun.

## 2) Potensi Sumber Air

### 1. Air Tanah

#### a. Ketahanan lama mata air

Wilayah Kabupaten Indramayu memiliki kemampuan sebagai lahan mata air adalah di wilayah bagian selatan Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Cikedung.

#### b. Kemampuan lahan air tahan bebas

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indramayu mempunyai zona lahan air tanah bebas (zona air tanah dangkal)

c. Kemampuan lahan hidrologi pantai

Kemampuan lahan hidrologi pantai sangat mempengaruhi tata air dengan fungsi penahan intrusi air laut dan abrasi laut, yang termasuk kawasan pantai adalah sepanjang pantai timur dan utara Kabupaten Indramayu termasuk sebagian Kecamatan Krangkeng, Juntinyuat, balongan, Sindang, Indramayu, Cantigi, Losarang, Karangampel, Kandanghaur dan Kecamatan Sukra. Kemampuan hidrologi pantai ini dibagi dua zona yaitu zona pantai dan zona rawa

2. Air Tanah Tertekan

Air tanah tawar dapat diperoleh dengan cara membor sumur bor dalam yang selanjutnya akan memancarkan air tanah tawar. Daerah Kedung dawa -Kedokan Gabus-Cibereng-Losarang, merupakan akumulasi air tanah dalam tawar yang cukup besar, serta juga di sekitar Jatibarang- Krasak-Amanggir-Kaplongan-jengkok. Kualitas air tanah tertekan di wilayah yang disebutkan diatas umumnya cukup baik, air bening, pH berkisar antara 6,43 - 8,53, kandungan CI di bagian selatan jalur jalan Provinsi umumnya rendah yaitu antara 11,2 - 582,6 mg/l,g setempat mencapai 111 mg/l yaitu di Desa Krangken.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut Berita Republika co.id (2021), angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu cukup tinggi. Padahal, Kabupaten Indramayu adalah salah satu lumbung padi di Indonesia. Suhardono, Direktur Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, menganalisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Jawa Barat menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu Mencapai 14,99%. Sedangkan target angka kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk 4.444 jiwa hanya 8-10%. Kemudian peneliti juga mengambil sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu (BPS - Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022) Kemiskinan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 mencapai 11,89%, tahun 2019

mencapai 11,11%,dan pada tahun 2020 12,70% sumber dari BPS - Survei Sosial Ekonomi Nasional. Melihat dari data tersebut sudah jelas bahwasannya kemiskinan bukanlah permasalahan yang baru lagi untuk Indonesia.

**APBDES**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**PEMERINTAH DESA Sukamelang**

**PENDAPATAN DESA**

1. Pendapatan Asli Desa:	
a. Hasil Usaha Desa	: Rp 11.500.000
2. Pendapatan Transfer:	
a. Dana Desa	: Rp 1.321.146.000
b. Bagi Hasil Pajak & Retribusi	: Rp 121.665.000
c. Alokasi Dana Desa	: Rp 622.903.500
3. Pendapatan Lain-lain:	
a. Pendapatan Lain-lain	: Rp 16.000.000
<b>Total Rencana Pendapatan</b>	<b>: Rp 2.092.214.500</b>

**Belanja Desa**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp 806.500.000
Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp 715.000.000
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp 100.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp 371.500.000
Belanja Tak Terduga	: Rp 99.214.500
<b>Total Rencana Belanja</b>	<b>: Rp 2.092.214.500</b>
Sisa Lebih Anggaran Desa	: Rp. 0

:



**PERATURAN DESA SUKAMELANG TENTANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN  
2020**

**BAGIAN I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- 1) Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan pembangunan di Desa Sukamelang.
- 2) Kegiatan pembangunan Desa Sukamelang mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, ekonomi desa, dan lingkungan.

Pasal 2

- 3) Pembangunan Desa Sukamelang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah disusun dan disahkan.
- 4) RPJM Desa menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

**BAGIAN II PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Pasal 3

- 1) Program pembangunan desa yang akan dilaksanakan di Desa Sukamelang tahun 2020 antara lain: a. Pembangunan jalan desa dan jembatan. b. Pembangunan fasilitas kesehatan desa. c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan. d. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. e. Pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi lokal. f. Penataan lingkungan desa dan pengelolaan sampah. g. Pembangunan sarana olahraga dan rekreasi desa.

Pasal 4

- 1) Program-program pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas akan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya manusia, anggaran desa, partisipasi masyarakat, dan koordinasi dengan instansi terkait.

- 2) Pelaksanaan program pembangunan desa akan diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan.

### **BAGIAN III PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **Pasal 5**

- 1) Kepala Desa Sukamelang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan RPJM Desa.
- 2) Kepala Desa dapat membentuk tim atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan program pembangunan desa.

#### **Pasal 6**

- 1) Anggaran pembangunan desa dialokasikan dari Dana Desa, dana pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan desa lainnya, serta bantuan dan kerjasama dari pihak ketiga yang sah
- 2) Penggunaan anggaran pembangunan desa harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAGIAN IV PENUTUP**

#### **Pasal 7**

- 1) Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku selama satu tahun.
- 2) Segala ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan ditetapkan kemudian melalui keputusan kepala desa.

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUKAMELANG TAHUN 2020-2025**

### **VISI:**

"Mewujudkan Desa Sukamelang yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera"

### **MISI:**

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa yang mendukung konektivitas dan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Mendorong pengembangan potensi ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Melestarikan lingkungan desa yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

### **TUJUAN PEMBANGUNAN:**

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur desa.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan potensi ekonomi desa dan pendapatan masyarakat.
4. Melestarikan dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan desa.
5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

### **PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN:**

#### **A. Pembangunan Infrastruktur Desa:**

1. Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan desa.
2. Pembangunan dan perawatan sarana air bersih desa.
3. Pembangunan dan perawatan saluran irigasi pertanian.

4. Pembangunan dan perbaikan jembatan desa.
5. Pembangunan dan perawatan sarana drainase desa.

**B. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan:**

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas desa.
2. Peningkatan akses pendidikan dengan pembangunan ruang kelas baru.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Penyelenggaraan program kesehatan masyarakat desa.

**C. Pengembangan Ekonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat:**

1. Pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat desa.
3. Pengembangan potensi pertanian dan peternakan desa.
4. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat desa.

**D. Pelestarian Lingkungan Desa:**

1. Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan.
3. Penanaman pohon dan penghijauan desa.
4. Pemanfaatan energi terbarukan.

**E. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:**

1. Penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya desa.
2. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan.
3. Pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

**EVALUASI DAN PENYUSUNAN RKP DESA:**

Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk tahun berikutnya..

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Partisipan**

Peneliti melibatkan beberapa partisipan yang berperan penting dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan beberapa warga masyarakat setempat. Melibatkan partisipan dari berbagai peran dan latar belakang ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai isu akuntabilitas dalam pembangunan jalan. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan jalan, peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan di balik pelanggaran prinsip good governance dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik dan berdasarkan bukti yang solid untuk memperbaiki masalah yang ada dan memajukan pembangunan jalan yang berkualitas di Desa Sukamelang.

**Temuan Penelitian**

##### **A. Ketidak Perbaikan Jalan Sejak 2018**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sukamelang, terungkap bahwa jalan di desa tersebut mengalami kerusakan yang signifikan dan belum pernah mengalami perbaikan sejak tahun 2018 hingga 2023. Premis bahwa jalan rusak tidak diperbaiki selama periode yang cukup lama ini diperkuat dengan temuan lapangan yang menunjukkan adanya kerusakan pada permukaan jalan, jalan berlubang, dan kerusakan struktural lainnya. Jalan yang rusak ini menjadi sumber ketidaknyamanan dan bahaya bagi masyarakat setempat.

Kepala Desa menyadari kondisi jalan yang serius tersebut, namun mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk perbaikan jalan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia dan adanya prioritas pembangunan lainnya yang menjadi pertimbangan utama dalam alokasi dana. Meskipun pemahaman akan pentingnya memperbaiki jalan telah ada, namun tantangan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan membuat keputusan yang tepat dalam alokasi dana menjadi kendala yang signifikan dalam proyek pembangunan jalan di Desa Sukamelang.

Kepala Desa: "Saya mengakui bahwa jalan di Desa Sukamelang mengalami kerusakan yang serius. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, kami belum berhasil mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk perbaikan jalan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan lainnya. Kami harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan desa, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya, yang juga memerlukan alokasi dana yang signifikan."

Namun demikian, penting untuk mencatat bahwa kerusakan jalan yang terlihat jelas melalui temuan lapangan tidak hanya mencerminkan kondisi fisik jalan yang memprihatinkan, tetapi juga memberikan gambaran tentang pentingnya aspek akuntabilitas dalam pembangunan jalan. Dalam hal ini, aspek akuntabilitas melalui transparansi dan partisipasi masyarakat perlu diperhatikan secara serius dalam upaya memperbaiki kondisi jalan yang ada.

Melalui transparansi, pemerintah desa dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai alokasi anggaran dan rencana perbaikan jalan. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan dan memverifikasi bahwa alokasi tersebut dilakukan secara adil dan efisien. Selain itu, transparansi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan

dan mengevaluasi proyek pembangunan jalan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Selain transparansi, partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting dalam memperbaiki kondisi jalan yang ada. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan jalan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka dipertimbangkan secara adekuat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, konsultasi publik, atau pemantauan proyek secara langsung. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan terkait perbaikan jalan akan lebih terinformasi, berkelanjutan, dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri.

Dengan memperhatikan aspek akuntabilitas melalui transparansi dan partisipasi masyarakat, diharapkan bahwa upaya memperbaiki kondisi jalan di Desa Sukamelang dapat berjalan dengan lebih baik. Masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek pembangunan jalan tersebut, sementara pemerintah desa akan mendapatkan masukan berharga dan dapat membangun kepercayaan publik yang lebih baik. Sebagai hasilnya, proses pembangunan jalan akan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Sukamelang.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa jalan di Desa Sukamelang tidak pernah diperbaiki selama periode yang cukup lama, perlu adanya upaya yang lebih proaktif dalam mengelola dana pembangunan dan mengarahkannya ke perbaikan jalan yang mendesak. Dalam hal ini, transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pembangunan jalan. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait



pembangunan jalan akan memungkinkan mereka untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap perbaikan jalan yang lebih baik.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat peran Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat setempat dalam meningkatkan akuntabilitas pembangunan jalan di Desa Sukamelang.

## B. Kurangnya Transparansi dalam Proses Pembangunan Jalan

Dalam wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa anggota BPD Sukamelang, terungkap bahwa proses pembangunan jalan di desa tersebut kurang transparan. Terdapat ketidakjelasan yang signifikan dalam alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan pengawasan. Masyarakat merasa tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan tidak dapat memverifikasi penggunaan dana publik yang dialokasikan untuk perbaikan jalan.

Ketika Kepala Desa diwawancarai, ia mengakui pentingnya transparansi dalam pembangunan jalan dan menyadari bahwa saat ini belum terdapat mekanisme yang memadai untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan jalan. Ia menekankan perlunya peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran dan pembangunan sistem pengawasan yang lebih kuat guna memastikan akuntabilitas dalam proses pembangunan jalan.

Dalam pandangan Kepala Desa, peningkatan transparansi dapat dicapai melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses bagi masyarakat. Ini meliputi menyediakan informasi mengenai alokasi anggaran, tahapan proyek, dan kemajuan pembangunan jalan secara berkala. Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau dan memverifikasi penggunaan dana publik serta memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Selain itu, Kepala Desa juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan sistem pengawasan yang lebih kuat. Sistem pengawasan yang efektif akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dalam proyek pembangunan jalan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, baik melalui mekanisme partisipasi atau pemantauan langsung, keabsahan penggunaan dana publik dapat dijamin dan ketidakjelasan dalam proses pembangunan jalan dapat diminimalisir. Dengan demikian, melalui pengakuan Kepala Desa akan pentingnya transparansi dan pengembangan sistem pengawasan yang lebih kuat, terdapat dorongan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Dengan adanya transparansi yang lebih baik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan bahwa keraguan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembangunan jalan dapat berkurang, sementara efektivitas dan keberlanjutan pembangunan jalan dapat ditingkatkan.

Kepala Desa: "Kami menyadari pentingnya transparansi dalam pembangunan jalan. Namun, saat ini kami belum mampu menyediakan mekanisme yang memadai untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan memastikan dana yang digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan jalan. Kami perlu meningkatkan transparansi dan membangun sistem pengawasan yang lebih kuat."

Sekretaris Desa juga mengakui adanya keterbatasan dalam hal pengawasan dan pelaporan pembangunan jalan. Masalah ini terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas yang ada dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan efektif.

Sekretaris Desa: "Kami memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan dan pelaporan pembangunan jalan. Masalah ini terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kami dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan efektif."

Selain itu, anggota BPD Sukamelang juga memberikan perspektif mereka terkait perjuangan dalam memastikan penggunaan dana publik yang transparan dalam pembangunan jalan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kendala yang signifikan dalam mengakses informasi yang lengkap dan mendapatkan akses yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan. Dalam perannya sebagai wakil masyarakat, anggota BPD Sukamelang menyadari pentingnya memiliki akses yang transparan terhadap informasi terkait alokasi anggaran, tahapan proyek, dan penggunaan dana publik. Namun, mereka mengungkapkan bahwa saat ini terdapat hambatan dan keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Kendala ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif dan memverifikasi penggunaan dana publik secara transparan.

Dalam konteks ini, anggota BPD Sukamelang berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan dalam akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jalan. Mereka mengadvokasi adanya mekanisme yang lebih terbuka dan mudah diakses untuk memastikan bahwa informasi terkait alokasi anggaran dan perkembangan proyek pembangunan jalan tersedia secara transparan bagi masyarakat. Selain itu, anggota BPD Sukamelang juga mendorong pemerintah desa untuk melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengawasan proyek pembangunan jalan. Dengan memberikan akses yang memadai dan kesempatan untuk melakukan pemantauan langsung, mereka dapat berperan sebagai penjaga akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Melalui kerja sama antara pemerintah desa dan anggota BPD, diharapkan bahwa pengawasan yang lebih efektif dan transparan dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembangunan jalan.

Dalam kesimpulan, anggota BPD Sukamelang telah mengungkapkan tantangan dan perjuangan mereka dalam memastikan penggunaan dana publik yang transparan dalam pembangunan jalan. Melalui advokasi mereka ter-

hadap akses informasi yang lebih lengkap dan partisipasi aktif dalam pengawasan, diharapkan bahwa upaya mereka akan memperkuat akuntabilitas dalam proses pembangunan jalan di Desa Sukamelang.

Anggota BPD: "Kami berusaha memastikan penggunaan dana publik yang transparan. Namun, kami juga menghadapi kendala dalam mengakses informasi yang lengkap dan mendapatkan akses yang memadai untuk melakukan pengawasan."

Temuan ini dengan jelas menunjukkan perlunya perbaikan yang signifikan dalam aspek transparansi pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Adanya kekurangan dalam transparansi dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek memunculkan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan tingkat keterbukaan informasi. Dalam hal ini, langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang cukup untuk memantau dan memverifikasi penggunaan dana publik secara efektif. Peningkatan transparansi dalam alokasi anggaran akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan dalam pembangunan jalan. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaan dana akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sumber daya publik yang berharga tersebut digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, perbaikan dalam pelaksanaan proyek juga penting untuk meningkatkan transparansi. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi dapat ditekan. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan dengan integritas dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, baik oleh lembaga pemerintah desa maupun oleh anggota masyarakat yang peduli. Pelatihan dan pendidikan tentang tata kelola yang baik dan praktik transparansi akan memperkuat kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif dan berkontribusi pada pembangunan jalan yang lebih akuntabel. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi. Masyarakat harus diberikan forum partisipasi yang nyata, di mana mereka dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan mereka terkait pembangunan jalan. Keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka harus melibatkan mereka secara langsung, sehingga masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam pembangunan desa mereka. Perbaikan yang signifikan dalam aspek transparansi pembangunan jalan ini akan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dana publik yang dialokasikan untuk perbaikan jalan digunakan dengan tepat sasaran. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa keputusan pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan mereka dan memberikan manfaat yang nyata bagi mereka serta memperkuat prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan desa.

### C. Kurangnya Akuntabilitas dalam Proses Pembangunan Jalan

Dalam wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa anggota BPD Sukamelang, terungkap dengan jelas bahwa proses pembangunan jalan di desa tersebut tidak mencapai tingkat akuntabilitas yang memadai. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan yang signifikan dalam alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan pengawasan. Masyarakat merasa terbatas dalam akses mereka terhadap informasi yang diperlukan dan tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi penggunaan dana publik yang dialokasikan untuk perbaikan jalan.

Kepala Desa dengan tegas mengakui pentingnya akuntabilitas dalam pembangunan jalan dan menyadari bahwa saat ini belum ada mekanisme yang memadai untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek serta memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan jalan. Kesadaran ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam proses pembangunan jalan.

Kepala Desa secara jelas menyatakan perlunya peningkatan transparansi dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek. Dengan meningkatkan tingkat transparansi, masyarakat akan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai penggunaan dana publik untuk perbaikan jalan. Mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memverifikasi apakah dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pengembangan sistem pengawasan yang lebih kuat juga menjadi fokus penting, di mana partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dengan serius.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, langkah-langkah konkret harus diambil. Peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses mengenai alokasi anggaran dan perkembangan proyek pembangunan jalan. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki peran aktif dalam pengawasan proyek. Selain itu, pemerintah desa harus memperkuat sistem pengawasan dengan memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran dalam penggunaan dana publik.

Dengan melakukan perbaikan dalam aspek akuntabilitas ini, masyarakat Desa Sukamelang akan memiliki keyakinan bahwa proses pembangunan jalan dilakukan dengan integritas dan efektivitas yang tinggi. Mereka akan merasakan manfaat langsung dari penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel untuk perbaikan jalan, yang pada gilirannya

akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperkuat prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan desa.

Kepala Desa: "Kami menyadari pentingnya akuntabilitas dalam pembangunan jalan. Namun, saat ini kami belum mampu menyediakan mekanisme yang memadai untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan memastikan dana yang digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan jalan. Kami perlu meningkatkan transparansi dan membangun sistem pengawasan yang lebih kuat."

Sekretaris Desa, dalam wawancara tersebut, juga dengan jujur mengakui adanya keterbatasan dalam hal pengawasan dan pelaporan pembangunan jalan. Dia mengungkapkan bahwa masalah ini terkait erat dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas yang tersedia dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan efektif.

Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan, Sekretaris Desa menyadari bahwa sumber daya manusia yang tersedia terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengawasi proyek pembangunan jalan dengan cermat dan menyeluruh. Kurangnya personel yang terlatih dan terampil dalam hal pengawasan dapat membatasi kemampuan Sekretaris Desa dan timnya untuk memantau progres proyek, mendeteksi ketidaksesuaian, dan melakukan pelaporan yang akurat. Selain itu, Sekretaris Desa juga mengakui bahwa kapasitas yang ada saat ini belum mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan efektif. Mungkin ada keterbatasan dalam pengetahuan teknis atau pemahaman tentang prinsip-prinsip pengawasan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, seperti pelatihan atau pendidikan lanjutan bagi staf terkait, agar mereka dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih kompeten dan efisien.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan tersebut, penting untuk melakukan upaya kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak

terkait lainnya. Dengan bekerja sama, sumber daya manusia dan kapasitas yang terbatas dapat dikompensasi dengan adanya sinergi dan pendekatan yang berkelanjutan. Masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan proyek pembangunan jalan dengan memberikan masukan, melaporkan ketidaksesuaian yang mereka temukan, dan mendukung upaya pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, pemangkasan birokrasi yang tidak perlu dan penggunaan teknologi informasi yang tepat juga dapat membantu meningkatkan efisiensi pengawasan. Penggunaan sistem pelaporan digital atau platform berbasis teknologi dapat memudahkan pelaporan, pemantauan, dan pengawasan proyek pembangunan jalan, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi kepada masyarakat.

Dengan mengakui keterbatasan yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas pengawasan, Sekretaris Desa dan timnya dapat mengatasi tantangan dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan jalan di Desa Sukamelang dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berhasil. Sekretaris Desa: "Kami memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan dan pelaporan pembangunan jalan. Masalah ini terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kami dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan efektif."

Anggota BPD Sukamelang, dalam wawancara tersebut, juga dengan tegas mengungkapkan perjuangan mereka dalam memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel dalam proyek pembangunan jalan. Mereka menyampaikan bahwa mereka menghadapi kendala yang signifikan dalam mengakses informasi yang lengkap serta mendapatkan akses yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap proyek pembangunan jalan. Anggota BPD Sukamelang menyadari bahwa akses yang terbatas terhadap informasi yang relevan merupakan hambatan dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka. Informasi yang lengkap dan terperinci tentang alokasi anggaran, perencanaan proyek, kontrak, dan proses pelaksanaan menjadi penting agar mereka dapat melakukan pengawasan



yang efektif. Namun, dalam praktiknya, mereka sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi tersebut, baik karena keterbatasan transparansi dari pihak terkait maupun proses yang rumit dan membingungkan. Selain itu, akses yang memadai untuk melakukan pengawasan secara langsung juga menjadi masalah yang dihadapi oleh anggota BPD Sukamelang. Dalam beberapa kasus, mereka tidak memiliki akses yang cukup ke lokasi proyek, dokumentasi progres, atau pertemuan terkait proyek. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam memantau secara langsung pelaksanaan proyek, mendeteksi potensi ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Menghadapi tantangan ini, penting untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan kolaborasi antara anggota BPD, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Dibutuhkan kerjasama yang erat dan saling mendukung untuk memastikan bahwa anggota BPD memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan dan dapat melakukan pengawasan secara efektif. Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antara semua pihak terkait akan membantu mengatasi kendala akses yang dihadapi oleh anggota BPD Sukamelang. Selain itu, perlu diperhatikan juga perlunya penguatan kapasitas anggota BPD dalam melakukan pengawasan. Pelatihan dan pembekalan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengawasan yang baik serta pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan pengawasan dengan efektif.

Dalam konteks ini, penting juga untuk mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna. Penggunaan platform digital untuk melaporkan, memantau, dan mengelola informasi terkait proyek pembangunan jalan dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi, sehingga memudahkan anggota BPD Sukamelang dalam melakukan pengawasan.

Dengan mengatasi kendala akses yang dihadapi dan memperkuat kapasitas pengawasan, anggota BPD Sukamelang dapat menjalankan peran mereka secara lebih efektif dalam memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel dalam proyek pembangunan jalan. Upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengawasan yang lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan jalan yang berkualitas di Desa Sukamelang..

Anggota BPD: "Kami berusaha memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Namun, kami juga menghadapi kendala dalam mengakses informasi yang lengkap dan mendapatkan akses yang memadai untuk melakukan pengawasan."

Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan secara menyeluruh dalam aspek akuntabilitas pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Penting untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek agar masyarakat dapat memantau dan memverifikasi penggunaan dana publik secara efektif. Dengan adanya transparansi yang lebih tinggi, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi terkait proyek pembangunan jalan, termasuk perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain meningkatkan transparansi, diperlukan juga peningkatan kapasitas pengawasan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik dalam pembangunan jalan. Anggota BPD Sukamelang dan pihak terkait lainnya perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap proyek pembangunan jalan. Pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengawasan yang baik dan tugas-tugas yang terkait perlu diberikan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan lebih efisien. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan

juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek dapat memperkuat transparansi dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dengan baik. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan yang diambil akan lebih akurat, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Perbaikan dalam aspek akuntabilitas ini akan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dana publik yang dialokasikan untuk perbaikan jalan digunakan dengan tepat sasaran. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan institusi terkait serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selain itu, dengan adanya akuntabilitas yang lebih baik, pembangunan jalan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Sukamelang..

#### D. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Selain kurangnya akuntabilitas, penting juga untuk mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jalan di Desa Sukamelang masih minim. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan dan tidak memiliki peran yang cukup dalam pengawasan proyek.

Dalam berbagai pertemuan dan diskusi, warga masyarakat telah menyampaikan keluhan mereka terkait minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan. Mereka merasa bahwa partisipasi aktif mereka sangat penting dalam menyampaikan masukan, aspirasi, dan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa. Warga ingin memiliki akses yang lebih baik untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Selain itu, warga juga berharap dapat ikut serta dalam pengawasan proyek pembangunan jalan. Mereka ingin memastikan bahwa dana publik yang

dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan terlibat dalam pengawasan, masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam memastikan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan proyek pembangunan jalan.

Dalam menghadapi keluhan dan harapan warga tersebut, penting bagi pemerintah desa dan instansi terkait untuk memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat. Mereka perlu menciptakan forum yang inklusif dan terbuka, di mana warga dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan jalan. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan juga dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan proyek.

Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan, akan tercipta ikatan yang lebih kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini akan menciptakan proses pembangunan jalan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa pembangunan jalan benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Sukamelang..

Warga Masyarakat: "Kami merasa bahwa pemerintah desa belum memberikan kesempatan yang cukup kepada kami untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan. Kami ingin dapat menyampaikan masukan, aspirasi, dan kebutuhan kami. Kami juga ingin ikut serta dalam pengawasan proyek agar dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat."

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jalan memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah desa dapat mendengarkan kebutuhan dan aspirasi warga serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa pembangunan jalan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam konteks good governance, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jalan serta memperkuat mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh stakeholders. Hal ini akan membangun kepercayaan dan transparansi dalam penggunaan dana publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat yang mereka layani.

Selain kurangnya akuntabilitas dan minimnya partisipasi masyarakat, terdapat pula indikasi adanya praktik korupsi yang melibatkan oknum di dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Temuan ini muncul dalam beberapa wawancara dengan masyarakat setempat yang mencurigai adanya penyelewengan dana dan kegiatan korupsi yang merugikan kepentingan publik.

Beberapa warga masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi praktik korupsi dalam pembangunan jalan. Mereka merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan desa ternyata tidak mencerminkan hasil yang diharapkan. Kutipan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat menggambarkan kekhawatiran tersebut:

Warga Masyarakat: "Kami menduga bahwa ada praktik korupsi yang terjadi dalam pembangunan jalan di desa kami. Dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan tidak sepenuhnya tersalurkan dengan baik. Kualitas pekerjaan yang dilakukan juga terkesan asal-asalan. Kami sangat berharap pemerintah desa dapat melakukan investigasi menyeluruh terhadap hal ini."

Praktik korupsi dalam pembangunan jalan sangat merugikan masyarakat setempat. Selain menghambat proses perbaikan jalan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup mereka, juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan sistem pemerintahan yang ada.

Dalam perspektif good governance, pemerintah desa harus berkomitmen untuk memerangi korupsi dan menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik. Hal ini meliputi kebijakan transparansi, penguatan sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Masyarakat juga perlu didorong untuk melaporkan indikasi korupsi yang mereka temui agar tindakan yang tepat dapat diambil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah desa perlu melakukan langkah-langkah seperti menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi anggaran dan kemajuan proyek pembangunan jalan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek juga harus ditingkatkan melalui forum diskusi, pertemuan publik, dan mekanisme partisipasi lainnya.

Pemerintah desa juga harus memberikan kejelasan mengenai prosedur pengadaan, pemilihan kontraktor, dan kualitas pekerjaan yang diharapkan. Dengan melakukan semua itu, pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan dengan integritas dan penuh tanggung jawab.

### 3. Implikasi Berdasarkan Landasan Teori Good Governance

#### A. Implikasi Berdasarkan Good Governance Aspek Akuntabilitas.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek akuntabilitas dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Kurangnya transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan yang efektif menjadi kendala utama dalam mencapai akuntabilitas yang baik.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pembangunan jalan :

##### 1. Meningkatkan Transparansi:

Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan penggunaan dana publik. Informasi mengenai penggunaan dana harus diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam hal ini, perlu dibangun mekanisme pelaporan yang terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat

Kepala Desa: "Kami akan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat."

Sekretaris Desa: "Kami akan mengupayakan pembangunan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini akan membantu dalam memperbaiki akuntabilitas dalam penggunaan dana publik untuk pembangunan jalan."

## 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa perlu menciptakan mekanisme partisipasi yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Selain itu, perlu juga dibangun mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat agar mereka dapat memastikan dana yang digunakan dengan baik.

Kepala Desa: "Kami akan memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan jalan. Kami akan mengadakan pertemuan terbuka dan memfasilitasi dialog dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan mereka."

Sekretaris Desa: "Kami akan mengupayakan pelibatan masyarakat melalui berbagai forum partisipatif. Kami akan mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan proyek pembangunan jalan."

### 3. Meningkatkan Pengawasan

Pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Hal ini meliputi pembentukan tim pengawas yang terdiri dari anggota BPD dan masyarakat, serta penguatan peran BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik.

Anggota BPD: "Kami akan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Kami akan memperkuat peran kami dalam memastikan penggunaan dana yang akuntabel dan berkualitas."

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Transparansi yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan pengawasan yang efektif akan membantu memastikan penggunaan dana publik yang tepat dan mendorong tercapainya pembangunan jalan yang berkualitas.

#### B. Implikasi Berdasarkan Good Governanance Aspek Transparansi

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek transparansi dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Kurangnya informasi yang tersedia, minimnya akses masyarakat terhadap data penggunaan dana, dan kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan menjadi kendala utama dalam mencapai transparansi yang baik.



Untuk meningkatkan transparansi dalam pembangunan jalan :

#### 1. Meningkatkan Akses Informasi

Pemerintah desa perlu menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat terkait alokasi anggaran, rencana pembangunan, dan penggunaan dana publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan website resmi desa, papan pengumuman, atau publikasi secara berkala.

Kepala Desa: "Kami akan berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Kami akan memperbarui website desa dan memastikan data terkait pembangunan jalan dapat diakses dengan mudah."

Sekretaris Desa: "Kami akan mengupayakan peningkatan akses informasi melalui papan pengumuman yang terpasang di tempat strategis. Kami juga akan menyediakan salinan dokumen terkait pembangunan jalan yang dapat diakses oleh masyarakat."

#### 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa perlu melibatkan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan. Mekanisme partisipasi seperti musyawarah desa, forum publik, atau kelompok diskusi perlu digunakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan aspirasi mereka.

Kepala Desa: "Kami akan mengadakan musyawarah desa secara rutin untuk mendengar pendapat dan aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan. Keputusan akan diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh warga."

Sekretaris Desa: "Kami akan mengorganisir forum publik dan kelompok diskusi terkait pembangunan jalan. Melalui forum ini, masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kontribusi mereka."

### 3. Meningkatkan Pengawasan

Pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Hal ini meliputi pembentukan tim pengawas yang independen, pelatihan bagi anggota tim pengawas, serta penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik.

Anggota BPD: "Kami akan memperkuat peran kami dalam melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan. Kami akan bekerja sama dengan tim pengawas independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik."

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, partisipasi aktif masyarakat, dan pengawasan yang efektif, diharapkan dana publik yang digunakan untuk pembangunan jalan dapat lebih transparan dan mendorong tercapainya pembangunan jalan yang berkualitas.

### C. Implikasi Berdasarkan Good Governanance Aspek Partisipasi

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, minimnya akses terhadap informasi, dan kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif menjadi kendala utama dalam mencapai partisipasi yang baik.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan :

#### 1. Meningkatkan Kesempatan Partisipasi

Pemerintah desa perlu menciptakan ruang yang lebih inklusif dan terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan. Mekanisme partisipasi seperti musyawarah desa, forum publik, atau kelompok diskusi perlu ditingkatkan dan disediakan secara teratur.

Kepala Desa: "Kami akan memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa dan forum publik terkait pembangunan jalan. Keputusan akan dipertimbangkan dengan melibatkan masukan dari seluruh masyarakat."

Sekretaris Desa: "Kami akan memfasilitasi kelompok diskusi terkait pembangunan jalan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbagi ide dan masukan. Kami akan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan."

#### 2. Peningkatan Akses Informasi:

Pemerintah desa perlu menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pembangunan jalan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan dokumen terkait, pengumuman yang terbuka, dan penyediaan informasi melalui media sosial atau website desa.

Kepala Desa: "Kami akan berkomitmen untuk meningkatkan akses informasi terkait pembangunan jalan. Kami akan menyediakan dokumen dan informasi terbaru yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi desa dan media sosial."

Sekretaris Desa: "Kami akan memperbarui sistem pengumuman dan memastikan bahwa informasi terkait pembangunan jalan mudah diakses oleh masyarakat. Kami juga akan menyediakan salinan dokumen yang dapat diambil oleh masyarakat."

### 3. Penguatan Mekanisme Partisipasi:

Pemerintah desa perlu meningkatkan efektivitas mekanisme partisipasi yang ada, seperti musyawarah desa atau forum publik, dengan mengadakan pelatihan bagi fasilitator dan meningkatkan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kepala Desa: "Kami akan melibatkan para fasilitator yang terlatih dalam mengadakan musyawarah desa dan forum publik. Kami juga akan memastikan adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses partisipasi."

Sekretaris Desa: "Kami akan menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa mekanisme partisipasi berjalan dengan baik. Kami juga akan meningkatkan komunikasi dua arah dengan masyarakat untuk memperkuat keterlibatan mereka."

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Dengan adanya kesempatan partisipasi yang lebih baik, akses informasi yang lebih terbuka, dan mekanisme partisipasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan dan mendorong tercapainya pembangunan jalan yang berkualitas.

## Analisis

1. Ketidak Perbaikan Jalan Sejak 2018:
  - a. Akuntabilitas: Tidak adanya upaya yang cukup proaktif dari pemerintah desa untuk mengalokasikan dana dan sumber daya yang diperlukan menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memperbaiki jalan. Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas atas penundaan perbaikan jalan tersebut.
  - b. Responsibilitas: Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jalan yang layak digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memperbaiki jalan yang rusak, yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi masyarakat.
2. Kurangnya Transparansi dalam Proses Pembangunan Jalan:
  - a. Alokasi Anggaran: Kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran pembangunan jalan membuat masyarakat tidak dapat memahami dan memverifikasi bagaimana dana publik digunakan. Informasi mengenai pengeluaran dana tidak diberikan secara terbuka, sehingga masyarakat tidak dapat memastikan bahwa anggaran yang diberikan secara adil dan efisien.
  - b. Pelaksanaan Proyek: Tidak ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan atau tahapan proyek pembangunan jalan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan kebingungan dalam proses pembangunan.
  - c. Pengawasan: Kurangnya transparansi juga terlihat dalam mekanisme pengawasan. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk memantau dan mengawasi proyek pembangunan jalan, sehingga tidak ada mekanisme yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan atau praktik korupsi.
3. Kurangnya Akuntabilitas dalam Proses Pembangunan Jalan:
  - a. Pelaksanaan Proyek: Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup mengenai kemajuan proyek, penggunaan dana, atau kualitas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini menghambat kemampuan masyarakat untuk memverifikasi dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana publik.
  - b. Pengawasan: Tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan dengan baik. Kurangnya pengawasan memberikan ruang bagi praktik korupsi dan

penyalahgunaan kekuasaan.

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat:

- a. Pengambilan Keputusan: Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan. Tidak ada forum partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, atau masukan mereka. Ini mengabaikan prinsip dasar good governance yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.
- b. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi terkait proyek pembangunan jalan dan tidak dilibatkan dalam pemantauan atau pengawasan proyek. Hal ini mengurangi akuntabilitas dan efektivitas pembangunan jalan.

5. Kurangnya Keberlanjutan Proyek

- a. Perencanaan Jangka Panjang: Tidak ada strategi perencanaan jangka panjang yang terlihat dalam pembangunan jalan. Proyek pembangunan jalan cenderung dilakukan tanpa mempertimbangkan pemeliharaan jangka panjang dan keberlanjutan infrastruktur tersebut.
- b. Pengelolaan Sumber Daya: Kurangnya pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan rutin mengakibatkan jalan menjadi rusak dan tidak berkelanjutan dalam jangka waktu yang singkat. Tidak adanya strategi yang berkelanjutan mengakibatkan pemborosan anggaran dan waktu.

Dalam keseluruhan analisis, dapat dilihat bahwa pembangunan jalan di Desa Sukamelang mengalami pelanggaran prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan proyek. Penting bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pembangunan, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip good governance menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek infrastruktur

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi jalan di Desa Sukamelang mengalami kerusakan yang signifikan dan belum pernah mengalami perbaikan sejak tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan lainnya.
2. Terdapat kurangnya transparansi dalam proses pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Informasi terkait alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan pengawasan tidak tersedia secara terbuka bagi masyarakat.
3. Akuntabilitas dalam pembangunan jalan juga masih rendah di Desa Sukamelang. Terdapat ketidakjelasan dalam alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan pengawasan. Masyarakat merasa tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan tidak dapat memverifikasi penggunaan dana publik.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jalan juga minim. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan dan tidak memiliki peran dalam pengawasan proyek.
5. Terdapat indikasi adanya praktik korupsi dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Beberapa warga masyarakat mencurigai adanya penyelewengan dana dan kegiatan korupsi yang merugikan kepentingan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Transparansi dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta pencegahan praktik korupsi harus menjadi fokus

utama untuk mencapai pembangunan jalan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa perlu meningkatkan mekanisme pengawasan, membangun sistem pengawasan yang kuat, dan memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat yang mereka layani.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang:

### 1. Meningkatkan Transparansi:

- Pemerintah desa perlu menyediakan akses informasi yang lebih transparan kepada masyarakat mengenai alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan penggunaan dana publik untuk perbaikan jalan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, seperti laporan keuangan, rencana pembangunan, dan hasil audit.
- Perlu membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi penggunaan dana publik secara langsung, misalnya melalui pertemuan rutin dengan pemerintah desa atau melalui kelompok pemantauan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, dapat diperoleh kepastian bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan tepat sasaran.

### 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

- Pemerintah desa perlu menciptakan forum partisipasi yang inklusif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan. Forum ini dapat berupa pertemuan desa, kelompok diskusi, atau survei masyarakat yang memungkinkan warga untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan kebutuhan mereka terkait perbaikan jalan.
- Penting juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan jalan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan jalan

### 3. Meningkatkan Akuntabilitas

- Perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proyek pembangunan

jalan di Desa Sukamelang. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengawasan, baik melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun melalui kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti auditor independen atau LSM yang dapat melakukan pengawasan secara objektif dan transparan.

- Penting untuk menetapkan prosedur dan regulasi yang jelas dalam penggunaan dana publik untuk perbaikan jalan. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk audit internal dan eksternal, serta sanksi yang tegas terhadap praktik korupsi atau penyelewengan dana.

#### 4. Peningkatan Kapasitas:

- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan pembangunan jalan, termasuk sumber daya manusia dan sistem pengelolaan keuangan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi staf pemerintah desa, BPD, serta masyarakat terkait.
- Penting juga untuk menggandeng pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah kabupaten, LSM, atau lembaga akademik, untuk memberikan dukungan teknis dan sumber daya dalam upaya peningkatan kapasitas.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan akan terjadi perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rosyada, Dede. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Jogiyanto HM dan Willy Abdillah. 2011. *Sistem tatakelola teknologi informasi*. Yogyakarta: Andi
- Sondang P. Siagian. 2005. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV. Gunung Agung
- Husein, Umar. 2003. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Alijoyo, A, Wijaya, B & Jacob, I. 2021. *Structured or Semi-structured Interviews*. Bandung: CRMS
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Mandar Maju. Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kecamatan Kroya Dalam Angka*. Indramayu: BPS.

### Jurnal :

- Andi Asnudin. 2009. "Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat", Vol 7 No 4. Hlm. 292-300
- Fika Novitasari, Sri Maryati. 2014 "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Wilayah Indonesia", Vol 3 No 2.
- Neneng Siti Maryam 2016 "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Vol 6 No 1

**Skripsi :**

Sudarni. 2015 “Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”. Skripsi. Makasar : Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Idrus, Djen Ahmad. 2015 “Peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memberdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur desa”. Skripsi. Makasar : Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Luqman. 2007 “Perananan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Citta Kecamatan Liliraja, Kab. Soppeng”. Skripsi. Makasar : Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin

**Website :**

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [berita online] ; Internet ;diakses pada tanggal 10 mei 2023 pukul 20.00. tersedia di <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>

Bada Pusat Statistik Kabupaten Indramayu ; Internet :diakses pada tanggal 12 juni 2023 pukul 21.00 tersedia di <https://indramayukab.bps.go.id/>

## LAMPIRAN









## Draft Pertanyaan

1. Siapa nama bapa/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu?
3. Bagaimana Anda menilai kondisi jalan di Desa Sukamelang yang mengalami kerusakan serius dan belum diperbaiki sejak 2018 hingga 2023?
4. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk perbaikan jalan?
5. Bagaimana Anda melihat pentingnya aspek akuntabilitas dalam pembangunan jalan, terutama melalui transparansi dan partisipasi masyarakat?
6. Bagaimana Anda melihat kurangnya transparansi dalam proses pembangunan jalan di Desa Sukamelang?
7. Apa keterbatasan yang dihadapi dalam hal pengawasan dan pelaporan pembangunan jalan?
8. Menurut Anda, apa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan transparansi dan pembangunan sistem pengawasan yang lebih kuat?
9. Bagaimana Anda melihat perjuangan Anda dalam memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel dalam pembangunan jalan?
10. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengakses informasi yang lengkap dan melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan?
11. Bagaimana peran BPD dalam meningkatkan akuntabilitas pembangunan jalan di Desa Sukamelang?
12. Bagaimana Anda merasakan minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan dan apa harapan Anda terkait hal ini?
13. Bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pembangunan jalan?
14. Apakah Anda memiliki kekhawatiran terkait adanya praktik korupsi dalam pembangunan jalan di Desa Sukamelang? Jika ya, apa dasar kekhawatiran tersebut dan apa yang Anda harapkan dari pemerintah desa?
15. Bagaimana proses pengalokasian dana pembangunan dilakukan di Desa Sukamelang?
16. Apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan



prioritas penggunaan dana pembangunan?

17. Apakah terdapat mekanisme pengawasan yang memastikan penggunaan dana pembangunan yang tepat dan efektif?
18. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana pembangunan?
19. Bagaimana Desa Sukamelang mengelola dan melaporkan penggunaan dana pembangunan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten atau instansi terkait?
20. Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam mengelola dana pembangunan di Desa Sukamelang? Jika ya, apa langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya?
21. Bagaimana peran kepala desa dan aparat desa lainnya dalam mengawasi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan?
22. Apakah terdapat pelatihan atau program pengembangan kompetensi yang diberikan kepada staf desa terkait pengelolaan dana pembangunan?
23. Bagaimana Desa Sukamelang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana pembangunan?
24. Apakah terdapat rencana atau inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan di masa mendatang?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochammad Alif Al Fajar  
TTL : Tangerang, 5 Januari 1998  
Alamat : Blok Kecamatan Rt 01 Rw 01 Desa Kroya Kec Kroya Kab Indramayu  
NIM : 1606016024  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
IPK : 3.11  
Agama : Islam  
E-mail : [icumlai@gmail.com](mailto:icumlai@gmail.com)  
No.Hp : 085795222991

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 01 Kroya
2. SMP : SMP Negeri 01 Kroya
3. SMA : SMA Negeri 01 Sukagumiwang

### RIWAYAT ORGANISASI

1. TELAPAK KAKI
2. PMII Rayon FISIP
3. DEMA-F UIN WALISONGO
4. Himpunan Mahasiswa Jawa Barat,DKI Jakarta dan Banten
5. KROYA ADVENTURE
6. SANCAPALA
7. OSACA

Semarang, 10 Juni 2023



MOCHAMAD ALIF AL FAJAR  
1606016024